



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MALANG
NOMOR : 00.9.3.3/ 018 /35.73.406/2024

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang telah menyusun Standar Operasional Prosedur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Nomor : 188.451/ 22 /35.73.406/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional perlu menyesuaikan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956)
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini maka Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 188.451/22 /35.73.406/2023 tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 29 Januari 2024

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP., M.SI.
Pembina Tingkat I
NIP. 19790709 199810 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 NOMOR: 000.9.3.3/ 018 /35.73.406/2024
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PADA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RUANG LINGKUP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

NO.	JUDUL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
1.	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Ranwal Renstra)
2.	Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra)
3.	Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Rankhir Renstra)
4.	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
5.	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja)
6.	Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja)
7.	Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja)
8.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
9.	Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan)
10.	Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan)
11.	Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan)
12.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
13.	Penyusunan LPPD
14.	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
15.	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
16.	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD
17.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
18.	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (PRKA) SKPD
19.	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Rencana Kerja (Renja)
20.	Penyusunan Laporan Evaluasi Dan Monitoring Kinerja Pencapaian Sasaran Per Tribulan
21.	Penetapan Perjanjian Kinerja
22.	Pengumpulan dan Pengolahan Data Kinerja
23.	Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

NO.	JUDUL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
24.	Penyusunan Proses Bisnis
25.	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
26.	Penyusunan Laporan Akhir Keuangan
27.	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
28.	Pengajuan SPP Uang Persediaan (UP)
29.	Pengajuan SPP Ganti Uang (GU)
30.	Pengajuan SPP Tambah Uang (TU)
31.	Pengajuan SPP LS Gaji
32.	Pengajuan SPP LS Pembayaran Barang Jasa
33.	Pembuatan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD
34.	Pembuatan Laporan Realisasi Keuangan Tahunan OPD
35.	Pembayaran Retribusi
36.	Verifikasi Bukti Pembayaran Retribusi
37.	Penyusunan Rekapitulasi Retribusi Perizinan Tertentu
38.	Rekonsiliasi Bendahara Penerima
39.	Asistensi Bendahara Penerima
40.	Penatausahaan Keuangan
41.	Pengelolaan Surat Masuk
42.	Pengelolaan Surat Keluar
43.	Pengadaan Barang Persediaan
44.	Pemeliharaan Sarana Prasarana
45.	Pemeliharaan Lingkungan Kerja
46.	Pembuatan Usulan Kenaikan Pangkat
47.	Penerimaan dan Penyimpanan Barang Inventaris
48.	Pengembalian Kendaraan Dinas Roda 2 / Roda 4
49.	Pengembalian Barang Inventaris
50.	Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Roda 2 / Roda 4
51.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
52.	Penyusunan Usulan Kenaikan Gaji Berkala

NO.	JUDUL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
53.	Penyusunan Usulan Pensiunan
54.	Pengajuan Permohonan Cuti
55.	Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
56.	Penyusunan SKP dan Penilaian Prestasi Kerja (ASN)
57.	Pelaporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
58.	Pengelolaan Barang Milik Daerah
59.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)
60.	Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD)
61.	Perawatan Barang Inventaris, Pengawasan dan Pemeliharaan Barang Inventaris Milik Daerah
62.	Pengadaan Barang/Jasa
63.	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD)
64.	Penyusunan Analisis Beban Kerja
65.	Mapping Kompetensi Jabatan
66.	Self Assesment Terkait Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan
67.	Penyusunan Analisis Jabatan
68.	Arsip Keluar
69.	Arsip Masuk
70.	Servis dan Suku Cadang Kendaraan
71.	Pembuatan E-Kinerja Pegawai
72.	Permohonan Informasi Publik / PPID
73.	Pengadaan BBM
74.	Penyediaan Makan dan Minum Rapat / Tamu
75.	Pinjam Pakai Ruang Rapat Mal Pelayanan Publik
76.	Permintaan Pinjam dan Pengembalian Berkas / Arsip Dinamis
77.	Mal Pelayanan Publik
78.	Pengaduan Mal Pelayanan Publik
79.	Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal
80.	Fasilitas Kemitraan
81.	Penyusunan Peta Potensi Investasi

NO.	JUDUL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
82.	Rencana Umum Penanaman Modal
83.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
84.	Promosi Penanaman Modal Secara Online
85.	Promosi Penanaman Modal Secara Offline
86.	Penyusunan Company Profil Penanaman Modal
87.	Pengesahan Peraturan Perusahaan
88.	Pelayanan Pengesahan LKS Bipartite
89.	Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
90.	Pelayanan Penyelesaian Kasus PHI / PHK
91.	Pengesahan Pemagangan Dalam Negeri
92.	Pelayanan Antar Kerja Lokal (AKL)
93.	Persetujuan Penyelenggaraan Job Fair
94.	Pembuatan Kartu Pencarian Kerja
95.	Penerbitan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus
96.	Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
97.	Pemenuhan Permintaan Data dan Informasi
98.	Pengelolaan Data Informasi
99.	Publikasi Kegiatan Melalui Media Online
100.	Penyaluran Informasi Melalui PPID Pembantu
101.	Pengelolaan Pengaduan Sedang
102.	Pengelolaan Pengaduan Berat
103.	Pengelolaan Pengaduan Ringan
104.	Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
105.	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal Melalui Pembinaan Pelaku Usaha
106.	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal Melalui Non Forum
107.	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal Berdasarkan Laporan Pelaku Usaha
108.	Penyaluran Pengaduan Yang Bukan Kewenangan
109.	Pengaduan Melalui Whatsapp Pengaduan

NO.	JUDUL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
110.	Izin Pendidikan Anak Usia Dini
111.	Izin Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/ Paket A, Paket B dan Paket C
112.	Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan/ Kursus
113.	Izin Pendidikan Lembaga Sekolah Dasar (SD)
114.	Izin Pendidikan Lembaga Sekolah Menengah Pertama (SMP)
115.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
116.	Izin Praktik Dokter
117.	Izin Praktik Bidan
118.	Izin Praktik Perawat
119.	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
120.	Izin Praktik Tenaga Gizi
121.	Izin Praktik Tenaga Sanitarian
122.	Izin Praktik Fisioterapis
123.	Izin Praktik Okupasi Terapis
124.	Izin Praktik Radiografer
125.	Izin Praktik Terapis Wicara
126.	Izin Praktik Refraksionis Optisien
127.	Izin Praktik Optometris
128.	Izin Praktik Penata Anestesi
129.	Izin Praktik Ortosis Protetis
130.	Izin Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
131.	Izin Praktik Apoteker
132.	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
133.	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
134.	Izin Praktik Elektromedis
135.	Izin Praktik Akupuntur Terapis
136.	Izin Praktik Psikologi Klinis
137.	Izin Praktik Teknisi Gigi
138.	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C

NO.	JUDUL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
139.	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D
140.	Izin Operasional Klinik
141.	Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
142.	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik
143.	Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah
144.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
145.	Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah
146.	Izin Praktik Fisikawan Medis
147.	Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan
148.	Izin Praktik Entomolog Kesehatan
149.	Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler
150.	Izin Praktik Audiologis
151.	Izin Praktik Radioterapis
152.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
153.	Izin Praktik Dokter Gigi
154.	Izin Praktik Dokter Spesialis
155.	Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
156.	Izin Praktik Perawat Anestesi
157.	Izin Praktik Ahli Kesehatan Masyarakat
158.	Izin Operasional Pengendalian Vektor
159.	Izin Operasional Griya Sehat
160.	Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
161.	Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja
162.	Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan
163.	Izin Praktik Tenaga Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan
164.	Izin Praktik Tenaga Biostatistik Dan Kependudukan
165.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga
166.	Izin Pekerjaan Tukang Gigi
167.	Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional

NO.	JUDUL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
168.	Penerbitan Sertifikat Laik Sehat (SLS)
169.	Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS)
170.	Penerbitan Rekomendasi Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah
171.	Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah
172.	Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
173.	Izin Penyelenggaraan Tontonan
174.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Gedung Gajayana
175.	Izin Griya SPA
176.	Izin Panti Sehat Berkelompok
177.	Surat Keterangan Penelitian
178.	Layanan Perizinan Mobil Keliling
179.	Perizinan Online Bertanda Tangan Elektronik (Izol Ber TTE)
180.	Pencabutan SIP (Surat Izin Praktik)
181.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja
182.	Keterangan Rencana Kota / Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
183.	Keterangan Rencana Tapak (Site Plan)
184.	Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
185.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Untuk Pengajuan SLF yang Belum Memiliki Persetujuan Bangunan (PBG)
186.	Izin Reklame Permanen
187.	Izin Reklame Insidentil
188.	Izin Penanaman Utilitas
189.	Izin Penutupan Saluran Drainase
190.	Izin Pelandaian Pedestrian/Trotoar
191.	Izin Konstruksi Sentral Telekomunikasi
192.	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
193.	Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
194.	Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah
195.	Persetujuan Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
196.	Persetujuan Teknis Baku Mutu Emisi

NO.	JUDUL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
197.	Surat Kelayakan Operasional (SLO) Baku Mutu Air Limbah
198.	Surat Kelayakan Operasional (SLO) Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
199.	Surat Kelayakan Operasional (SLO) Baku Mutu Emisi
200.	Permintaan Informasi Pemanfaatan Ruang (PU)
201.	Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (PKPLH)
202.	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)
203.	Izin Penggunaan Tanah Makam
204.	Izin Penggunaan Tanah Makam Tumpangan
205.	Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas
206.	Izin Trayek Angkutan
207.	Izin Usaha Angkutan
208.	Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan - Produk Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT - PDUK)
209.	Surat Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan
210.	Surat Pengantar Asal Ikan
211.	Izin Praktik Dokter Hewan
212.	Izin Praktik Paramedik Veteriner
213.	Legalisir Perizinan
214.	Pencabutan Perizinan